



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

2021

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2020



## KATA PENGANTAR

---

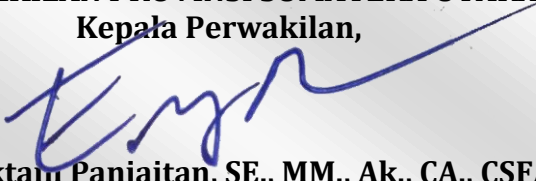


Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah Yang Maha Kuasa, karena atas Rahmat Nya serta kerja keras jajaran BPK Perwakilan provinsi Sumatera Utara sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 dapat tersusun. Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban BPK dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan BPK sesuai dengan alokasi dan penggunaan anggaran yang telah ditetapkan BPK untuk Tahun 2020. Laporan ini merupakan laporan tahun pertama pada periode Renstra 2020-2024.

Laporan ini merupakan wujud dari transparansi dan akuntabilitas kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara sebagai lembaga sektor publik yang berdasarkan mandat Undang-undang Dasar mengemban tugas untuk melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu, laporan ini kami jadikan sebagai salah satu media komunikasi BPK kepada publik dan para pemangku kepentingan lainnya untuk menyampaikan informasi kinerja BPK dalam memenuhi harapan akan terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 belum sepenuhnya dapat mencapai seluruh target IKU. Untuk itu, segenap jajaran pejabat struktural dan staf di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 terus berkomitmen untuk senantiasa berbenah diri dalam memperbaiki kinerja di Tahun 2021. Semoga LAK Tahun 2020 dapat menjadi media evaluasi dalam mengukur dan menilai kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dan memberikan manfaat bagi semua pihak.

**Medan, Januari 2021**  
**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**  
**PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**Kepala Perwakilan,**

  
**Eydu Oktan Panjaitan, SE., MM., Ak., CA., CSFA**  
**NIP 196910011996031001**

# ***Daftar Isi***

<b>Kata Pengantar.....</b>	<b>i</b>
<b>Daftar Isi.....</b>	<b>ii</b>
<b>Daftar Tabel .....</b>	<b>iv</b>
<b>Daftar Gambar.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1. Latar Belakang.....	1
2. Tugas Pokok dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara .....	1
3. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.....	4
4. Sumber Daya Manusia dan Anggaran BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.....	6
<b>BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA.....</b>	<b>7</b>
1. Perencanaan Strategis BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara...	7
2. Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja (PKPK) BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.....	8
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA .....</b>	<b>10</b>
A Pencapaian Skor Kinerja Tahun 2020.....	10
B Rincian Skor masing masing IKU.....	10
C Penjelasan Capaian IKU.....	11
1. IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan .....	11
2. IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan.....	12

3. IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan .....	13
4. IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik NAsional.....	13
5. IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan.....	14
6. IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal .....	14
7. IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK.....	15
8. IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP .....	15
9. IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi.....	16
10. IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan.....	17
11. IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi.....	18
12. IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi .....	18
13. IKU 13 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran.....	19
D Perbandingan Capaian IKU Tahun Berjalan Dengan Target Kinerja 5 Tahun Renstra.....	20
E Rencana Aksi Untuk Memerbaiki Kinerja di Masa Mendatang	21
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>22</b>

## ***Daftar Tabel***

		Halaman
Tabel 2.1	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara .....	9
Tabel 3.1	Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Utama, Target IKU dan Capaian IKU Tahun 2020.....	10
Tabel 3.2	Komponen IKU 1 .....	11
Tabel 3.3	Perbandingan Capaian IKU 1 Tahun 2020 dengan Capaian Tahun 2018-2019.....	12
Tabel 3.4	Perbandingan Capaian IKU 2 Tahun 2020 dengan Capaian Tahun 2018-2019.....	12
Tabel 3.5	Perbandingan Capaian IKU 3 Tahun 2020 dengan Capaian Tahun 2018-2019.....	13
Tabel 3.6	Perbandingan Capaian IK 4 Tahun 2020 dengan Capaian Tahun 2018-2019.....	14
Tabel 3.7	Perbandingan Capaian IK 5 Tahun 2020 dengan Capaian Tahun 2018-2019.....	14
Tabel 3.8	Perbandingan Capaian IK 6 Tahun 2020 dengan Capaian Tahun 2018-2019.....	15
Tabel 3.9	Perbandingan Capaian IK 7 Tahun 2020 dengan Capaian Tahun 2018-2019.....	15
Tabel 3.10	Perbandingan Capaian IK 8 Tahun 2020 dengan Capaian Tahun 2018-2019.....	16
Tabel 3.11	Rincian Nilai IKU Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi.....	16
Tabel 3.12	Perbandingan Capaian IK 9 Tahun 2020 dengan Capaian Tahun 2018-2019.....	17
Tabel 3.13	Perbandingan Capaian IK 10 Tahun 2020 dengan Capaian Tahun 2018-2019.....	18

Tabel 3.14	Perbandingan Capaian IK 11 Tahun 2020 dengan Capaian Tahun 2018-2019.....	18
Tabel 3.15	Perbandingan Capaian IK 12 Tahun 2020 dengan Capaian Tahun 2018-2019.....	19
Tabel 3.16	Perbandingan Capaian IK 13 Tahun 2020 dengan Capaian Tahun 2018-2019.....	19
Tabel 3.17	Rincian Nilai Komponen EKA di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.....	20
Tabel 3.18	Perbandingan Capaian IKU Tahun Berjalan Dengan Target Kinerja 5 Tahun Renstra 2020-2024 .....	20

## ***Daftar Gambar***

Gambar 2.1	Visualisasai Renstra BPK 2020-2024 .....	7
Gambar 2.2	Visualisasai Renstra BPK Perwakilan Provinsi .....	8

# ***Bab I Pendahuluan***

---

## **1. Latar Belakang**

Sebagai tindak lanjut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang mewajibkan setiap instansi pemerintah tidak terkecuali Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Kewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tidak hanya melekat pada BPK sebagai suatu lembaga, tapi juga unsur-unsur pelaksana BPK sebagaimana dinyatakan dalam peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pasal 13 yang menyatakan bahwa instansi yang wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja diantaranya adalah (c) Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga dan (e) Unit kerja mandiri yang ditetapkan.

## **2. Tugas Pokok dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara**

Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. BPK merupakan satu lembaga yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan tanggung jawab keuangan negara, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. Untuk melaksanakan tugas pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, BPK dibantu oleh pelaksana BPK. Auditorat Utama Keuangan Negara V yang selanjutnya disebut AKN V adalah salah satu unsur pelaksana tugas pemeriksaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Anggota V BPK.

AKN V mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama,



Badan Pengelola Keuangan Haji, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang, dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut, serta keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada pemerintah daerah di wilayah Sumatera dan Jawa

Sesuai Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, AKN V membawahi dua Auditorat, satu sekretariat AKN dan 16 Perwakilan Wilayah Barat, satu di antaranya adalah BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi AKN V, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Auditor Utama Keuangan Negara V, menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
2. Perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
3. Perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
4. Penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan investigatif;
5. Penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
6. Pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
7. Pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
8. Penyusunan bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
9. Pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, yang dilaksanakan oleh pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;

11. Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
12. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
13. Penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
14. Penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
15. Penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Auditorat Investigasi;
16. Pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
17. Pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan Database Entitas pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
18. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara; dan
19. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

### 3. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara



Sesuai dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara adalah salah satu unsur pelaksana BPK yang berada dibawah AKN V yang terdiri dari:

**Subauditorat Sumatera Utara I;**

Mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kota Pematangsiantar, Kabupaten Samosir, Kabupaten Langkat, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Karo, dan Kota Binjai, Kabupaten Labuhanbatu Utara, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN. Pada saat ini Kepala Subauditorat Sumatera I adalah Nugroho Heru Wibowo.

**Subauditorat Sumatera Utara II;**

Mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Padangsidimpuan, Kabupaten Nias, dan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kota Gunung Sitoli, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN. Pada saat ini Kepala Subauditorat Sumatera II adalah Puspitaningtyas.

**Subauditorat Sumatera Utara III;**

Mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Dairi, Kabupaten Toba Samosir, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Batubara, Kota Medan, Kabupaten Asahan, Kabupaten Humbang Hasundutan, dan Kota Tanjung Balai, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Padang Lawas serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN. Pada saat ini Kepala Subauditorat Sumatera III adalah Syafruddin Lubis.

**Sekretariat Perwakilan;**

Mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler,

serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
2. Pengurusan sumber daya manusia, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan prasarana BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
3. Pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan, dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
4. Penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;
5. Pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Kinerja dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
6. Penyimpanan *Database* Entitas Pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara; dan
7. Penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
8. Melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Utara dan menyampaikan pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Utara.

Pada saat ini Kepala Sekretariat Perwakilan adalah Sigit Hermawan.

#### **4. Sumber Daya Manusia dan Anggaran BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara**

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara didukung oleh 163 personil, meliputi 10 personil struktural (eselon II s.d. eselon IV), 46 Personil di unit kerja penunjang pendukung (Sekretariat Perwakilan) dan 110 personil di unit kerja pemeriksaan/auditorat. BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2020 memperoleh pagu anggaran sebesar Rp39.880.479.000,00 sesuai dengan RKAKL TA 2020, direvisi menjadi Rp42.125.175.000,00 dan terealisasi sebesar Rp38.036.134.749,00.

## **Bab II**

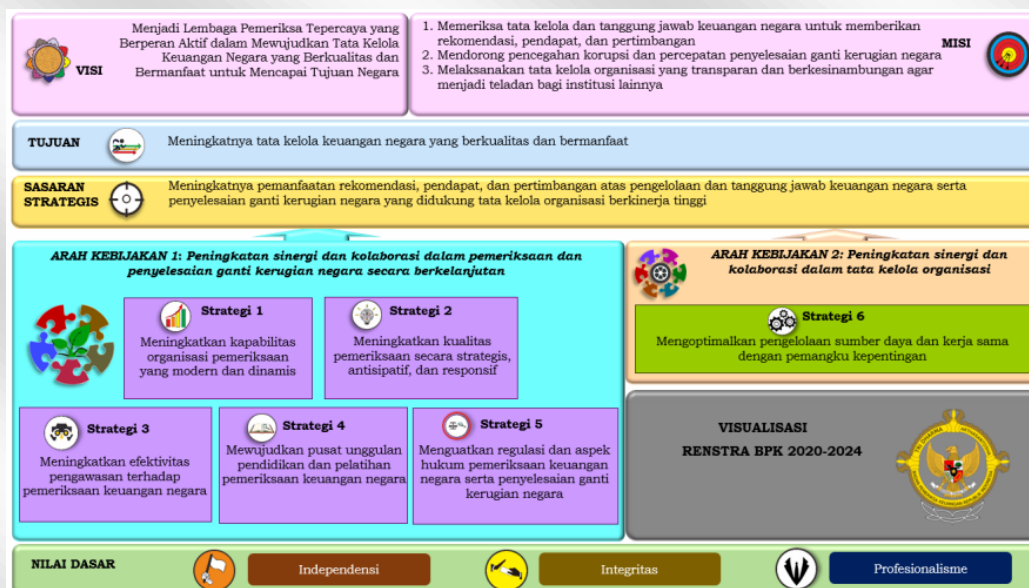
# **Perencanaan Strategis dan Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara**

---

### 1. Perencanaan Strategis BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara

Renstra BPK 2020-2024 menetapkan visi, misi, dan tujuan strategis BPK. Untuk mencapai visi, misi dan tujuan strategis tersebut, BPK menetapkan Sasaran Strategis “Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara yang didukung tata kelola organisasi berkinerja tinggi”.

Untuk mencapai Sasaran Strategis, BPK merumuskan arah kebijakan dan strategi. Bentuk visualisasi hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi dapat dilihat dalam gambar berikut.



**Gambar 2.1: Visualisasi Renstra BPK 2020-2024**

Sebagai unit kerja pemeriksaan dalam naungan Auditorat Keuangan Negara V, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara sangat mendukung strategi meningkatkan kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif, dan responsif.

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara mempunyai 2 sasaran kegiatan, yaitu:

1. Meningkatkan pemeriksaan berkualitas;
2. Meningkatnya layanan pemeriksaan.

Berikut merupakan visualisasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2024.



**Gambar 2.2: Visualisasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2024**

## 2. Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja (PKPK) BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara

Untuk mengukur pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta target pencapaian IKU. IKU beserta target pencapaiannya dituangkan dalam Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja (PKPK) yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Utara selaku pihak pertama, Pejabat Eselon I (dhi. Auditor Utama Keuangan Negara V) selaku pihak kedua, dan diketahui oleh Ketua, Wakil Ketua dan Anggota V BPK RI.

Berikut Sasaran Kegiatan, IKU dan target pencapaian IKU BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020.

**Tabel 2.1 – Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama  
BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara TA 2020**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama		Target 2020
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%
	IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%
	IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
	IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%
	IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%
	IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%
	IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)
	IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	A (86,00)
	IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%
	IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%
	IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)
	IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%
	IKU 13	Tingkat Kinerja Anggaran	87%



## **Bab III Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara**

### **A. Pencapaian Skor Kinerja Tahun 2020**

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2020 memperoleh skor pencapaian kinerja 96,96.

### **B. Rincian Skor masing-masing IKU**

Berikut adalah target dan realisasi pencapaian IKU BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020.

**Tabel 3.1 Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Utama,  
Target IKU dan Capaian IKU Tahun 2020**

No	Sasaran Kegiatan	Anggaran	Indikator Kinerja Utama		Target 2020	Realisasi 2020	Skor
1	Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	Anggaran awal sebesar Rp39.880.479.000,00 dan direvisi sebesar Rp 42.125.175.000,00	IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	77,94%	77,94
2			IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100
3			IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	81,13%	105
4			IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100,93%	100,93
5			IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100
6			IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100%	100
7			IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)	Sangat memuaskan (4,56)	91,2
8			IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	A (86,00)	A (88,62)	103,05
9			IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	98,14%	103,31

No	Sasaran Kegiatan	Anggaran	Indikator Kinerja Utama		Target 2020	Realisasi 2020	Skor
10			IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	50%	50
11			IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	Memuaskan (3,54)	93,16
12			IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100/
13			IKU 13	Tingkat Kinerja Anggaran	87%	93,56%	105

### C. Penjelasan Capaian IKU

Pencapaian target IKU Tahun 2020 sebagaimana disajikan dalam tabel 3.1 Indikator Kinerja Utama, Target IKU dan Capaian IKU dapat dijelaskan sebagai berikut.

#### 1. IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan

IKU ini bertujuan untuk mendorong kualitas pengendalian mutu pemeriksaan. Indikator ini mengukur pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan pada tiga tingkatan yaitu internal satker melalui QA dan QC dan eksternal melalui hasil evaluasi EPP dan hasil reviu Itama. Adapun bobot untuk penilaian QA dan QC sebesar 40%, hasil evaluasi EPP sebesar 50%, dan hasil reviu itama sebesar 10%.

Pada Tahun 2020, pencapaian IKU ini mencapai 77,94%. Nilai ini diperoleh dengan komponen sebagai berikut.

**Tabel 3.2 Komponen IKU 1**

No	Komponen IKU 1	Nilai	Bobot	Nilai
1	QA dan QC	100	40%	40,00%
2	Evaluasi EPP	55,88	50%	27,94%
3	Reviu Itama	100	10%	10,00%
	Jumlah			<b>77,94%</b>

Nilai QA dan QC berdasarkan pengisian lembar reviu oleh kepala perwakilan dan kepala subauditorat selaku PSP, dan pengendali mutu, pengendali teknis dan ketua tim selaku PFP. Pada lembar reviu tersebut telah dilakukan pengisian lembar reviu seluruhnya, sehingga nilai komponen IKU ini 100.

Berdasarkan evaluasi LHP oleh EPP, dari 34 LHP LKPD pada entitas di Provinsi Sumatera Utara, 17 LHP nilai konsistensinya 100, dan 21 LHP nilai akurasinya 100, sehingga nilai komponen IKU ini 55,88.

Evaluasi atas reviu itama belum dilakukan pengukuran pada Tahun 2020, namun nilai komponen IKU ini tetap dianggap 100.

Target IKU 1 pada Tahun 2020 adalah 100%, dan terealisasi sebesar 77,94% atau lebih kecil dari target. Sehingga skor untuk IKU 1 adalah 77,94. Ketidaktercapaian IKU ini dikarenakan komponen evaluasi LHP oleh EPP, nilai konsistensi yang 100% hanya 17 dari 34 entitas, dan nilai akurasi yang 100% hanya 21 dari 34 entitas. Hal ini akan menjadi perhatian perwakilan untuk meningkatkan kualitas LHP pada pemeriksaan kedepannya.

Untuk mencapai IKU 1 ini, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menganggarkan anggaran sebesar Rp397.260.000,00, dan terealisasi sebesar Rp146.172.001,00.

**Tabel 3.3 – Perbandingan Capaian IKU 1 Tahun 2020 dengan Capaian Tahun 2018-2019**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2020	Capaian 2020	Capaian 2019	Capaian 2018
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	77,94%	N/A	N/A

## 2. IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan

IKU ini menunjukkan hasil evaluasi atas kesesuaian Simpulan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Pemeriksaan dengan harapan penugasan yang tertuang dalam Program Pemeriksaan (P2). Dengan adanya IKU ini diharapkan satker pemeriksaan untuk terus meningkatkan kualitas LHP yang diterbitkan.

Pada Tahun 2020, pencapaian IKU ini sebesar 100% atau sama dengan target yang telah ditetapkan. Sehingga skor IKU 2 adalah 100.

Untuk mencapai IKU 2 ini, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menganggarkan anggaran sebesar Rp30.932.000,00, dan terealisasi sebesar Rp16.478.790,00.

**Tabel 3.4 – Perbandingan Capaian IKU 2 Tahun 2020 dengan Capaian Tahun 2018-2019**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2020	Capaian 2020	Capaian 2019	Capaian 2018
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	N/A	N/A

### 3. IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat penerimaan *auditee* atas rekomendasi BPK melalui penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Sehingga dengan pengukuran IKU ini diharapkan berdampak pada perbaikan tata kelola keuangan negara/daerah.

Pada Tahun 2020, realisasi IKU ini sebesar 81,13% atau lebih besar dari target sebesar 75%. Sehingga skor IKU 3 adalah 105. Ketercapaian IKU ini tidak lepas dari peran Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Utara dalam memotivasi pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Utara untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, serta kerja keras pemda untuk menindaklanjutinya. Data pemantauan tindak lanjut terakhir menggunakan data tindak lanjut per 11 Desember 2020.

Untuk mencapai IKU 3 ini, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara mengalokasikan anggaran sebesar Rp539.978.000,00, dan terealisasi sebesar Rp485.107.799,00.

**Tabel 3.5 – Perbandingan Capaian IKU 3 Tahun 2020 dengan Capaian Tahun 2018-2019**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target 2020	Capaian 2020	Capaian 2019	Capaian 2018
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	81,13%	75,73%	65,49%

### 4. IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional

Pemeriksaan tematik nasional adalah pemeriksaan yang dilaksanakan dalam satu tahun sebanyak satu atau lebih atas agenda pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan dilaksanakan oleh seluruh satker pemeriksaan sesuai dengan sudut pandang/tusi satker masing-masing dengan satu satker sebagai koordinator.

IKU ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik nasional/lokal berdasarkan isu strategis, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Daerah (RPJMN/D) dan *Sustainable Development Goals (SDG's)*.

Pada Tahun 2020, realisasi IKU ini sebesar 100,93%, atau lebih besar dari target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Sehingga skor IKU 4 adalah 100,93. Pada Tahun 2020, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara melaksanakan 9 pemeriksaan *COVID-19* yang terdiri dari 2 pemeriksaan kinerja dan 7 pemeriksaan PDTT.

Untuk mencapai IKU 4 ini, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menganggarkan anggaran sebesar Rp3.179.189.000,00, dan terealisasi sebesar Rp2.333.097.283,00.

**Tabel 3.6 – Perbandingan Capaian IKU 4 Tahun 2020 dengan Capaian Tahun 2018-2019**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target 2020	Capaian 2020	Capaian 2019	Capaian 2018
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tnggi	4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100%	100%	100%

### 5. IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan

IK ini menunjukkan sejauh mana BPK dapat memenuhi permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan seperti Lembaga Perwakilan dan IPH. Peningkatan pemenuhan pemeriksaan ini menunjukkan tingkat responsif BPK dalam memenuhi permintaan dari pemangku kepentingan. Pada Tahun 2020 tidak ada permintaan pemeriksaan oleh lembaga perwakilan atau IPH. Namun demikian, realisasi IKU ini tetap 100%, sama dengan target yang ditetapkan. Sehingga skor IKU 5 adalah 100.

**Tabel 3.7 – Perbandingan Capaian IK 5 Tahun 2020 Dengan Capaian Tahun 2018-2019**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target 2020	Capaian 2020	Capaian 2019	Capaian 2018
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tnggi	5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	N/A	N/A

### 6. IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal

Pemeriksaan tematik lokal adalah pemeriksaan di luar pemeriksaan keuangan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan strategi pemeriksaan BPK atas isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat di daerah atau menjadi tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD. IKU ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan *SDG's*.

Pada Tahun 2020, dilakukan revisi RKP, diantaranya output pemeriksaan kinerja lokal yang pada awalnya satu output menjadi ditiadakan dan difokuskan pada pemeriksaan kinerja tematik nasional. Namun demikian, realisasinya tetap dianggap 100%, atau sama dengan target. Sehingga skor IKU 6 adalah 100.

**Tabel 3.8 – Perbandingan Capaian IK 6 Tahun 2020 Dengan Capaian Tahun 2018-2019**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target 2020	Capaian 2020	Capaian 2019	Capaian 2018
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tnggi	6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100%	N/A	N/A

### 7. IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK

IKU ini mengukur tingkat pemahaman visi, misi, dan nilai-nilai dasar oleh seluruh pegawai BPK yang dilakukan melalui survey. IKU ini merupakan dasar bagi pengembangan budaya organisasi BPK. Survey dilakukan oleh surveyor independen.

Pada Tahun 2020, target IKU ini adalah 5.00 (memuaskan) dan terealisasi sebesar 4,56 atau lebih kecil dari target. Sehingga skor IKU 7 adalah 91,2. Ketidaktercapaian IKU ini mengindikasikan masih kurangnya pemahaman sebagian pegawai BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dalam memahami visi, misi dan nilai-nilai dasar BPK sesuai Renstra 2020-2024, sehingga masih perlunya sosialisasi baik dari pusat maupun perwakilan untuk mensosialisasikan visi, misi, dan nilai dasar sebagaimana tertuang pada renstra 2020-2024. Kegiatan *survey* ini dilakukan oleh BKP Pusat, sehingga anggaran untuk IKU ini dibebankan pada anggaran BPK Pusat.

**Tabel 3.9 – Perbandingan Capaian IKU 7 Tahun 2020 Dengan Capaian Tahun 2018-2019**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target 2020	Capaian 2020	Capaian 2019	Capaian 2018
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tnggi	7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	4,56	N/A	N/A

### 8. IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP

Evaluasi AKIP merupakan evaluasi yang dilaksanakan oleh Itama ke seluruh Satuan Kerja di BPK. IKU ini bertujuan untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja satuan kerja di BPK. Pada Tahun 2020, target IKU ini

adalah A (86,00), dan terealisasi A (88,62) atau lebih besar dari target. Sehingga skor IKU 8 adalah 103,05. Ketercapaian ini mengindikasikan semakin baiknya akuntabilitas kinerja satker di BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Pelaksanaan evaluasi dilakukan secara daring. Karena evaluasi dilakukan oleh Itama, sehingga anggaran untuk IKU ini dibebankan pada anggaran BPK Pusat.

**Tabel 3.10 – Perbandingan Capaian IKU 8 Tahun 2020 Dengan Capaian Tahun 2018-2019**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target 2020	Capaian 2020	Capaian 2019	Capaian 2018
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	8	Hasil Evaluasi AKIP	A (86)	A (88,62)	A (87,23)	BB (77,17)

## 9. IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

BPK melalui Biro TI telah menyediakan layanan TIK bagi seluruh pegawai yang meliputi layanan aplikasi layanan dasar, aplikasi umum, aplikasi pemeriksaan (SMP, SIAP, portal eAudit, SIPTL dan penggunaan Big Data Analytics) dan pemanfaatan Aplikasi Manajemen Pengetahuan untuk mendorong *IT culture* di lingkungan BPK. IKU ini bertujuan untuk mendorong satker agar memanfaatkan layanan TIK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Pada Tahun 2020, target IKU ini adalah 95% dan terealisasi sebesar 98,14% atau lebih besar dari target. Sehingga skor IKU 9 adalah 103,31. Ketercapaian IKU mengindikasikan bahwa sebagian besar pegawai BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah maksimal dalam memanfaatkan aplikasi internal BPK. Rincian untuk nilai IKU ini disajikan sebagai berikut.

**Tabel 3.11 – Rincian Nilai IKU Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi**

Layanan Dasar			Layanan Aplikasi Umum	Layanan Aplikasi Pemeriksaan				Aplikasi Manajemen Pengetahuan (5%)
E-mail (15%)	E-drive (10%)	Portal (5%)	Sisdin (25%)	SMP (10%)	SiAP (10%)	SiPTL (10%)	Big Data Analytic (10%)	
100%	100%	100%	92,56%	100%	100%	100%	100%	100%
Total	(30% x 100%) + (25% x 92,56%) + (40% x 100%) + (5% x 100%)							98,14%

Untuk mencapai IKU 9 ini, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menganggarkan anggaran sebesar Rp1.467.596.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.458.434.874,00.

**Tabel 3.12 – Perbandingan Capaian IKU 9 Tahun 2020 dengan Capaian Tahun 2018-2019**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target 2020	Capaian 2020	Capaian 2019	Capaian 2018
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	98,14%	97,77%	98,90%

### 10. IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan

Manajemen Pengetahuan merupakan upaya perolehan, penyimpanan, pengolahan dan pengambilan kembali, penggunaan dan penyebaran, serta evaluasi dan penyempurnaan pengetahuan secara efektif dalam suatu organisasi. Proses identifikasi pengetahuan ini mencakup praktik terbaik (*best practice*), penerapan *best practice*, dan aktivitas manajemen pengetahuan.

*Best practice* (BP) adalah setiap proses pekerjaan yang ada di BPK yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satker yang berwenang. Penerapan BP merupakan implementasi atas BP yang telah melewati proses validasi dan ditetapkan untuk di implementasi oleh unit/satuan kerja selain pengusul BP. Aktivitas manajemen pengetahuan merupakan metode yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan sharing/penyebaran informasi/pengetahuan.

Pada Tahun 2020, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara tidak mengusulkan *best practice*. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menerapkan *best practice* dengan judul Pemanfaatan portal EPP dalam penyusunan IHPS dan penyimpanan arsip IHPS. Dalam hal aktivitas manajemen pengetahuan, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara melaksanakan 7 kegiatan *knowledge transfer forum (ktf)* dengan narasumber dan peserta dari pegawai pemeriksa perwakilan. Dengan formula  $(50\% \times \text{usulan } \textit{best practice}) + (25\% \times \text{penerapan } \textit{best practice}) + (25\% \times \text{aktivitas manajemen})$ , maka realisasi untuk IKU ini sebesar 50%, atau lebih kecil dari target sebesar 100%. Sehingga skor IKU 10 adalah 50. Ketidaktercapaian IKU ini dikarenakan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara tidak membuat usulan *best practice* pada Tahun 2020. Hal ini akan menjadi perhatian bagi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dimasa mendatang.



**Tabel 3.13 – Perbandingan Capaian IKU 10 Tahun 2020 dengan Capaian Tahun 2018-2019**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target 2020	Capaian 2020	Capaian 2019	Capaian 2018
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	50%	N/A	N/A

### **11. IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi**

Tingkat kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi adalah tingkat kepuasan yang dirasakan oleh pemangku kepentingan atas hubungan, kerjasama dan komunikasi yang dilakukan oleh Perwakilan. IKU ini bertujuan untuk mendorong perwakilan agar meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di lingkungan perwakilan. Penilaian ini dilakukan oleh surveyor independen.

Pada Tahun 2020, target IKU ini sebesar 3,8 (memuaskan) dan terealisasi sebesar 3,54 (memuaskan). Ketidaktercapaian IKU ini mengindikasikan kurang maksimalnya kualitas komunikasi dengan para pemangku kepentingan yang terkait dengan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Pelaksanaan *survei* untuk IKU ini dilaksanakan oleh BPK Pusat, sehingga anggaran untuk IKU ini dibebankan pada anggaran BPK Pusat.

**Tabel 3.14 – Perbandingan Capaian IKU 11 Tahun 2020 dengan Capaian Tahun 2018-2019**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target 2020	Capaian 2020	Capaian 2019	Capaian 2018
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,8	3,54	N/A	N/A

### **12. IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi**

Sebagai organisasi yang bertumpu pada kecakapan dan keahlian, sumber daya manusia merupakan aset terpenting BPK. Oleh sebab itu, pengembangan kemampuan serta kompetensi pegawai BPK menjadi prioritas utama untuk dapat mencapai hasil pemeriksaan yang berkualitas.

IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan unit/satuan kerja dalam melaksanakan standar pemeriksaan terkait dengan pemenuhan persyaratan kompetensi dalam bentuk pendidikan berkelanjutan bagi pemeriksa yang melaksanakan tugas pemeriksaan.

Pada Tahun 2020, target IKU ini sebesar 100% dan terealisasi sesuai target, dimana seluruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah tercapai jam diklatnya. Sehingga skor IKU 12 adalah 100.

Untuk mencapai IKU 10 dan 12, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menganggarkan anggaran sebesar Rp289.076.000,00, dan terealisasi sebesar Rp286.017.218,00.

**Tabel 3.15 – Perbandingan Capaian IKU 12 Tahun 2020 dengan Capaian Tahun 2018-2019**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target 2020	Capaian 2020	Capaian 2019	Capaian 2018
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100%	100%

### 13. IKU 13 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran

Tingkat kinerja implementasi anggaran di lingkungan BPK termasuk Perwakilan Provinsi Sumatera Utara bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan termasuk kegiatan-kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan pemeriksaan tersebut.

Pada Tahun 2020 realisasi IK ini tercapai dengan realisasi 93,56% dari target 87%. Sehingga skor IKU 13 adalah 105.

**Tabel 3.16 – Perbandingan Capaian IKU 13 Tahun 2020 dengan Capaian Tahun 2018-2019**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target 2020	Capaian 2020	Capaian 2019	Capaian 2018
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	13	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara	87%	93,56%	73,68%	86,45%

Komponen IKU 13 terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dengan nilai 90,86%, dan
2. Nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) dengan nilai 97,67%.

Adapun rincian nilai EKA di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 3.17 – Rincian Nilai Komponen EKA di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020**

Komponen Nilai Kinerja	Nilai
Penyerapan Anggaran	89,74%
Konsistensi	97,32%
Pencapaian Keluaran	98,86%
Efisiensi	74,98%

Untuk mencapai IKU 13, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menganggarkan anggaran sebesar Rp365.362.000,00, dan terealisasi sebesar Rp364.039.519,00.

#### **D. Perbandingan Capaian IKU Tahun Berjalan Dengan Target Kinerja 5 Tahun Renstra**

Tahun 2020 adalah tahun pertama pelaksanaan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara periode 2020–2024. Perbandingan Capaian IKU BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara tahun berjalan dengan target kinerja 5 tahun disajikan pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 3.18 Perbandingan Capaian IKU Tahun Berjalan Dengan Target Kinerja 5 Tahun Renstra 2020-2024**

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target pada Renstra					Realisasi Tahun 2020	Persentase Realisasi Tahun 2020 dibanding target
		Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024		
Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi								
IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	77,94%	77,94%
IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target pada Renstra					Realisasi Tahun 2020	Persentase Realisasi Tahun 2020 dibanding target
		Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024		
IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%	81,13%	105%
IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100%	100%	100%	100%	100,93%	100,93%
IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)	Sangat memuaskan (5,0)	Sangat memuaskan (5,0)	Sangat memuaskan (5,0)	Sangat memuaskan (5,0)	Sangat memuaskan (4,56)	91,2%
IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	A (86,00)	A (87)	A (88)	A (89)	AA (90,05)	A (88,62)	103,05%
IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	96%	97%	98%	100%	98,14%	103,31%
IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%
IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	Memuaskan (3,80)	Memuaskan (3,80)	Memuaskan (3,80)	Memuaskan (3,80)	Memuaskan (3,54)	93,16%
IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
IKU 13	Tingkat Kinerja Anggaran	87%	83,5%	84%	84,5%	85,7%	93,56%	105%

#### E. Rencana Aksi Untuk Memperbaiki Kinerja Di Masa Mendatang

Rencana aksi untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang adalah:

1. Memperbaiki kualitas LHP yang diterbitkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
2. Mensosialisasikan visi, misi dan nilai dasar BPK yang baru sebagaimana tertuang pada Renstra 2020-2024 pada acara yang melibatkan seluruh pegawai;
3. Membuat usulan *best practice* pada Tahun 2021;
4. Meningkatkan kualitas komunikasi dengan para *stakeholder* yang terkait dengan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

## ***Bab IV Penutup***

---

LAK BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara ini merupakan perwujudan akuntabilitas pencapaian kinerja baik keberhasilan ataupun kegagalan dalam mencapai visi dan misi untuk terselenggaranya *good governance*.

Berdasarkan hasil validasi Direktorat PSMK, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara memperoleh pencapaian skor kinerja 96,96. Nilai ini menurun apabila dibandingkan dengan skor kinerja tahun 2019 yaitu sebesar 100,36. Penurunan pencapaian target IKU disebabkan berubahnya sebagian komponen IKU dari tahun sebelumnya dikarenakan perubahan renstra BPK. Namun demikian, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara akan semaksimal mungkin untuk memperbaiki capaian kinerja pada masa mendatang.